

Naikkan Peringkat Penanaman Modal dan Kesejahteraan Rakyat Sulbar

Salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan rakyat di wilayah administratifnya adalah melalui perencanaan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



OLEH:

RICHARDO SARAGIH

- Auditor pada Perwakilan BPKP Sulbar

Di dalam APBD tersebut masyarakat dapat melihat program kerja, strategi dan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan pemerintah daerah guna mewujudkan kata yang indah, 'kesejahteraan'.

Postur APBD Perubahan Pemprov Sulbar tahun Anggaran (TA) 2017 menunjukkan nilai pendapatan dianggarkan sebesar Rp 1.876.327.528.181,16 yang ter-

nilai Rp 1.549.902.593.000,00 serta pendapatan lainnya senilai Rp 2.113.687.246,00.

Dari data APBD tersebut terlihat derajat desentralisasi fiskal Pemprov Sulbar sebesar 17,28% ($324.311.247.935,16 / 1.876.327.528.181,16 \times 100\%$). Sesuai dengan Manual Administrasi Keuangan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri Tahun 1991, 10% - 20% masuk dalam kat-

si fiskal tersebut tentu tak mengurangi semangat pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Data tersebut seharusnya menjadi pemicu semangat pemerintah daerah melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, termasuk mendorong investor menanamkan modal di wilayah Sulbar.

Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA) untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Adapun tujuan penanaman modal itu sendiri tertuang dalam pasal 3 ayat (2), antara lain: a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b. Menciptakan lapangan kerja; c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologinasional; f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Keseluruhan tujuan yang telah diuraikan di atas ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Badan Koordinasi Penana-

al PMDN-PMA bulan Januari - September 2017. Data tersebut menempatkan Sulbar pada peringkat ke-28 untuk PMDN dan peringkat ke-33 untuk PMA dari 34 provinsi di Indonesia. Menurut data tersebut di wilayah Sulbar terdapat 16 proyek PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp 596,5 miliar dan terdapat 13 proyek PMA dengan nilai investasi sebesar 11,3 juta US\$ atau setara dengan Rp151,42 miliar (kurs US\$1=Rp13.400,00 sesuai dengan APBN-P 2017).

Nilai investasi, baik PMDN maupun PMA mengalami penurunan dari tahun 2010 ke tahun 2016. Perlu kajian lebih lanjut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov Sulbar untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut.

Langkah Maju

Mendorong pertumbuhan investasi di Sulbar diperlukan suatu lompatan bersama untuk melangkah maju. Seluruh stakeholder harus mengetahui potensi apa yang dimiliki provinsi ini yang dapat ditawarkan kepada investor.

Di jaman yang serba online saat ini, dimana semuanya sudah terkoneksi di dunia maya, segala informasi begitu cepat menyebar ke penjuru dunia. Cukup ambil foto dan share di media sosial, dalam hitungan detik kita akan memperoleh respon dari masyarakat luas atas apa yang kita bagikan.

Persoalannya saat ini, sudahkah kita mengetahui potensi ekonomi di Sulbar? Pemerintah da-

sis sumber daya ekonomi yang dimiliki Sulbar dan peta tersebut harus mudah diakses oleh masyarakat luas.

Data statistik daerah Sulbar Tahun 2017 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Perwakilan Sulbar menunjukkan komoditas ekspor daerah ini adalah Crude Palm Oil (CPO). Dijelaskan lebih lanjut terdapat pula aktivitas muat di pelabuhan Sulbar, antara lain: biji sawit, jagung dan pisang.

Sulbar yang memiliki lautan luas ternyata belum mengeksport sumber daya lautnya menurut data BPS tersebut.

Stakeholder termasuk masyarakat harus mampu mendatangkan investor ke Sulbar. Kita harus pastikan investor tak sekadar datang, melainkan menanamkan modalnya dan terus mengembangkannya di wilayah Sulbar. Kuncinya ada pada kesan pertama.

Investor yang mendapatkan kesan yang baik, tidak akan segan-segan untuk menanamkan modalnya bahkan menyampaikannya kesan baik tersebut juga kepada yang lainnya. Sehingga tidak mengherankan kalau data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menempatkan Jawa Barat pada peringkat pertama untuk PMA dan peringkat tiga untuk PMDN.

Investor juga menginginkan adanya kepastian dukungan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung kelancaran operasi atas investasinya. Misalnya ketersediaan sumber daya listrik, air bersih, infrastruktur dan sumber daya pendukung lain yang menjamin keberlangsungan investasinya.

an adanya kepastian hukum yang jelas, mudah, transparan dan tepat waktu serta tak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Kalau dulu sebelum adanya reformasi birokrasi kita sering mendengar istilah 'kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat' pada jaman digitalisasi atau jaman now ini, seyogianya istilah tersebut sudah berubah menjadi 'kalau bisa hari ini kenapa harus besok' sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan.

Kalau data BKPM per tanggal 30 September 2017 menempatkan Sulbar pada peringkat ke-33 untuk PMA dan peringkat ke-28 untuk PMDN dari 34 provinsi, harapannya di tahun 2018 dengan koordinasi dan sinergi yang komprehensif di antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov Sulbar dengan seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten di wilayah Sulbar dapat menyusun rencana strategis dalam rangka mendorong pertumbuhan PMDN-PMA, sehingga peringkat tersebut dapat ditingkatkan setidaknya sejajar dengan provinsi lain yang ada di pulau Sulawesi.

Kuncinya kita harus memahami potensi yang dimiliki Sulbar, promosi dan publikasi, bagaimana membangun kesan pertama yang positif bagi investor, dukungan sarana dan prasarana serta birokrasi dan regulasi yang transparan.

Dengan demikian, di samping APBD yang terbatas terdapat juga dukungan dari PMDN-PMA yang pada akhirnya bermuara